



# **LAPORAN KEGIATAN SAKIP POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG TAHUN 2022**

## **A. DASAR HUKUM EVALUASI**

Dasar hukum evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

## **B. LATAR BELAKANG**

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang AKIP. Untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilaksanakan Pusat Pendidikan KP dan Unit Pelaksana Teknis Binaan Pusdik sebanyak 20 Satuan Pendidikan KP, maka perlu ada dokumen yang melaporkan kegiatan yang sudah dilakukan untuk mendukung terwujudnya penguatan AKIP ini. Laporan ini juga sekaligus sebagai pendorong peningkatan kinerja instansi dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai dengan yang diamanahkan oleh Penetapan Kinerja (PK)

## **C. TUJUAN EVALUASI**

Tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP ini adalah sebagai berikut :

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- c. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi



#### **D. RUANG LINGKUP EVALUASI**

Ruang lingkup evaluasi atas Implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Informasi kinerja yang dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja bukanlah satu-satunya yang digunakan dalam menentukan nilai dalam evaluasi, akan tetapi juga termasuk berbagai hal (knowledge) yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan instansi

Dalam penerapannya, lingkup evaluasi atas Implementasi SAKIP mencakup :

1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan pengukuran kinerja;
2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan
4. Evaluasi terhadap kebijakan instansi/ unit kerja yang bersangkutan.

#### **E. METODOLOGI EVALUASI**

Metodologi yang digunakan dalam penilaian mandiri SAKIP ini adalah metodologi yang pragmatis karena disesuaikan dengan tujuan penilaian mandiri yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung harus bisa menjelaskan kelemahan dan kelebihan yang dimiliki masing – masing. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang memberikan petunjuk untuk perbaikan SAKIP dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada tahun berikutnya. Pelaksanaan penilaian mandiri dengan metodologi pragmatis menggunakan LKE (Lembar Kerja Evaluasi) dengan komponen sebagai berikut :

- a. Perencanaan kinerja, dengan bobot 30%;
- b. Pengukuran kinerja, dengan bobot 30%;
- c. Pelaporan kinerja, dengan bobot 15%;
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal, dengan bobot 25%;



Hasil evaluasi SAKIP dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100 dengan parameter sebagai berikut :

Tabel 1. Tabel Kategori Penilaian SAKIP

<b>N O</b>	<b>KATEGORI</b>	<b>NILAI ANGKA</b>	<b>INTERPRETASI</b>
1	AA	> 90 - 100	Sangat memuaskan
2	A	> 80 – 90	Memuaskan, memimpin perubahan, bekerja tinggi dansangat akuntabel
3	BB	> 70 – 80	Sangat baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	> 60 – 70	Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk menejemen kinerja, dan atau perlu sedikit perbaikan.
5	CC	> 50 – 60	Cukup (memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	> 30 – 50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	> 0 – 30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

## **F. GAMBARAN UMUM OBJEK EVALUASI**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 59/PERMEN-KP/2016 tanggal 3 Januari 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung, yang melakukan penilaian mandiri adalah Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung melalui Satuan Pengawas Internal.

## **G. GAMBARAN UMUM IMPLEMENTASI SAKIP**

Terkait dengan evaluasi SAKIP Tahun 2022, Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung telah melakukan penerapan AKIP di tingkat satkernya masing-masing.



Dokumen dokumen yang menggambarkan penerapan AKIP dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :

1. Memiliki dokumen RENSTRA;
2. Memiliki dokumen perjanjian kinerja;
3. Memiliki manual IKU;
4. Telah menyusun dokumen Laporan Kinerja (LKj) Tahunan;
5. Telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Triwulanan (LKj Interim);
6. Telah menyusun dokumen Rencana Aksi;
7. Mengisi Implementasi Rencana Aksi ;
8. Menyusun laporan Evaluasi Rencana Aksi Triwulanan;
9. Dalam rangka transparansi, dokumen-dokumen tersebut sebagian besar telah dipublikasikan melalui google drive dengan link :

[https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1gJwILmI\\_T29oCVj5tIWJPa19NhUfbrL8](https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1gJwILmI_T29oCVj5tIWJPa19NhUfbrL8)

## H. HASIL EVALUASI

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP maka Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung melalui Satuan Pengawas Internal melakukan penilaian mandiri pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung. Hasil evaluasi Sistem AKIP pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung memperoleh nilai 60.65 dari nilai maksimal 100 atau dengan predikat penilaian B sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. Daftar Rincian Hasil Evaluasi Sistem AKIP Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung

No	Komponen Penilaian	Nilai (%)
1	Perencanaan Kinerja	22.20
2	Pengukuran Kinerja	14.40
3	Pelaporan Kinerja	9.30
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	14.75



Dengan uraian terhadap hasil penilaian pada masing - masing komponen manajemen kinerja adalah sebagai berikut :

### **a. Perencanaan Kinerja**

Dokumen perencanaan kinerja di lingkup Politeknik Bitung tahun 2018 sampai 2022 telah disusun dalam bentuk Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan dengan kondisi :

1. Dokumen Renstra, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja telah disusun dengan baik dan selaras dengan dokumen di atasnya;
2. Apresiasi atas ketersediaan dokumen perencanaan kinerja selama > 2 tahun
3. Publikasi dokumen perencanaan kinerja pada website satker belum memperlihatkan aspek ketepatan waktu
4. Tindak lanjut atas evaluasi rencana aksi sebagai bentuk masukan perencanaan kinerja belum dilakukan secara berkala
5. Keterlibatan pimpinan dalam proses perencanaan kinerja belum terdokumentasikan dengan baik
6. Seluruh dokumen perencanaan dan telah dipublikasikan pada alamat website:
7. [https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qJwILmI\\_T29oCVj5tIWJPa19NhUfbrL8](https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qJwILmI_T29oCVj5tIWJPa19NhUfbrL8)

### **b. Pengukuran Kinerja**

Hasil evaluasi diketahui Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung telah disusun dan memiliki mekanisme pengukuran kinerja yang cukup memadai untuk mengukur pencapaian kinerja yang tercantum dalam PK.

1. SOP pengumpulan data kinerja belum tersedia
2. Kertas kerja untuk mengukur kualitas dan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja belum tersusun dengan baik
3. Keterlibatan pimpinan dalam proses pengukuran kinerja belum terdokumentasikan dengan baik
4. Pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.



### **c. Pelaporan Kinerja**

Laporan Kinerja (LKj) 2020 dan 2021 Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung telah disusun dan menyajikan informasi pencapaian sasaran serta menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja tahun berjalan dan telah dipublikasikan untuk dapat diakses publik pada alamat website.

1. Reviu atas LKj belum dilakukan
2. Publikasi dokumen pelaporan kinerja pada website satker belum memperlihatkan aspek ketepatan waktu
3. LKj belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja, analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan : target jangka menengah, realisasi kinerja di level kementerian/nasional/internasional (benchmark kinerja).
4. LKj belum seluruhnya menginfokan : detail kinerja dalam keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja; kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatanya; efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
5. Kertas kerja untuk mengukur kualitas dan pemanfaatan hasil pelaporan kinerja belum tersusun dengan baik
6. Tindak lanjut atas rekomendasi dalam LKj belum tersusun dengan baik secara berkala

### **d. Evaluasi Internal**

Berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung telah melaksanakan evaluasi dan rencana aksi secara periodik yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan melakukan tindakan nyata terhadap pelaksanaan rencana aksi yang dituangkan dalam perencanaan kegiatan, namun demikian perkembangan terhadap tindaklanjut tidak disajikan dalam laporan evaluasi.



Hasil penilaian SAKIP sbb :

1. Kompetensi SDM yang melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal masih terbatas
2. Belum seluruhnya rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal ditindaklanjuti
3. Belum seluruhnya hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja

#### **e. Rekomendasi**

##### 1. Perencanaan Kinerja

- Menjadikan budaya kinerja yang baik dalam penyediaan dokumen perencanaan kinerja
- Publikasi dokumen perencanaan kinerja pada website satker agar dilakukan secara berkala dan tepat waktu
- Tindak lanjut atas evaluasi rencana aksi sebagai bentuk masukan perencanaan kinerja agar dilakukan secara berkala
- Keterlibatan pimpinan dalam proses perencanaan kinerja agar didokumentasikan dengan baik

##### 2. Pengukuran Kinerja :

- Menyusun SOP pengumpulan data kinerja dan mengimplementasikannya secara berkala
- Kertas kerja untuk mengukur kualitas dan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja agar disusun dengan baik
- Keterlibatan pimpinan dalam proses pengukuran kinerja agar didokumentasikan dengan baik
- Mengimplementasikan Permen KP No.10 tahun 2020 sebagai dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.



### 3. Pelaporan Kinerja

- Melakukan reviu mandiri atas LKj atau mengusulkan pendampingan dari Pusat/ Sekretariat untuk melakukan reviu LKj
- Publikasi dokumen perencanaan kinerja pada website satker agar dilakukan secara berkala dan tepat waktu
- LKj agar dapat mencantumkan perbandingan realisasi kinerja, analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan : target jangka menengah, realisasi kinerja di level kementerian/nasional/internasional (benchmark kinerja).
- LKj agar dapat mencantumkan : detail kinerja dalam keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja; kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya; efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
- Kertas kerja untuk mengukur kualitas dan pemanfaatan hasil pelaporan kinerja agar disusun dengan baik

### 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- Meningkatkan kompetensi SDM yang melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal melalui bimtek/workshop yang dilakukan oleh Sekretariat atau instansi lain
- Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal
- Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja





## **f. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penyelenggaraan SAKIP Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Melakukan Reviu Internal terhadap Renstra yang terkait dengan kegiatan di Politeknik KP Bitung dan melaporkan hasilnya ke Pimpinan sebagai bahan pertimbangan penetapan IKU di Tahun berikutnya, sekaligus menselaraskan program antara Politeknik KP Bitung dan PUSDIK KP ;
2. Membuat matrik cascading IKU Pimpinan sampai dengan individu, dan menyusun SOP tentang pengumpulan data kinerja;
3. Menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada Laporan Kinerja;
4. Lebih cermat dalam menyajikan informasi Capaian Kinerja agar tidak terjadi perbedaan antara capaian

Bitung, September 2022

Direktur,



Daniel H. Ndahawali